

Wapres Ma'ruf Amin Menjadi Ketua Badan Pengarah Papua

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 121 tahun 2022 tentang Badan Pengarah Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

Perpres tersebut ditandatangani dan ditetapkan oleh Presiden Jokowi di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2022.

"Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua," bunyi Pasal 1 dikutip dari salinan Perpres tersebut.

Dijelaskan dalam Perpres tersebut bahwa Badan Pengarah Papua merupakan lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Badan Pengarah Papua mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi

Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam susunan organisasi, Badan Pengarah Papua diketuai oleh Wakil Presiden. Dengan anggota yakni menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Lalu, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; serta menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Dan satu orang perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua. Lalu, untuk membantu operasional pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua ditunjuk sekretaris eksekutif.

Keanggotaan dari Badan Pengarah Papua ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

"Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua bersumber dari APBN pada bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. ● han

KPK Periksa Kepala Sekolah hingga Ajudan Bupati Pemalang

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 18 orang saksi terkait kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang, Jawa Tengah.

Ke-18 saksi tersebut yakni, Denny Sabhara merupakan ajudan Bupati Pemalang, Tri Doyo Basuki menjabat sebagai Kepala SMPN 1 Ulujami, Anita Noviani menjabat sebagai Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Pasar Diskoperindag Pemalang, Artika Rahmawati menjabat sebagai Sub Koordinator Pendapatan Pasar Diskoperindag Pemalang.

Kemudian, Tunisih merupakan Kepala Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran Dinas Perhubungan Pemalang, M Bobby Dewantaramerupakan Plt Supervisor Bagian Umum BUMD PT Aneka Usaha, Tarno merupakan Kabid Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Pemalang, Muallip merupakan Kadis Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Pemalang.

Abdul Rachman merupakan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Pemalang, Addin Widi Wicaksono meruokan Kasubbag Umum Dinas PUPR Kabupaten Pema-

lang, Romdhon Sutomo merupakan Kabid Pembinaan Ketenagaan, Dinas Pendidikan dan Budaya Pemalang, serta M. Arifin menjabat mantan Sekda Pemalang.

Berikutnya, Winarto merupakan, Sub Koordinator Sarana dan Prasarana SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemalang, M Ramdon sebagai Kadis Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pemalang. Serta tiga orang dari pihak swasta, Eko Kadar Prasetyo, Lujeng Subagyo, dan Lavinia Lemony. Seorang lagi Pegawai Honorer bernama M Ade Sulaiman.

"Hari ini pemeriksaan saksi kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, untuk tersangka MAW (Mukti Agung Wibowo). Pemeriksaan dilakukan di Polres Pemalang," kata Plt Juru Bicara KPK, Ipi Maryati Kuding melalui pesan singkatnya, Senin (24/10).

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang. Keenam tersangka tersebut yakni,

Mukti Agung Wibowo, M. me

PKB dan Gerindra Cari Hari Baik untuk Resmikan Sekber Koalisi

JAKARTA (IM) - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya segera meresmikan Sekretariat Bersama (Sekber) Koalisi Gerindra-PKB. Adapun Sekber tersebut digunakan Koalisi Gerindra dan PKB untuk tempat berkumpul dalam menghadapi Pemilu 2024.

Peresmian Sekber, kata Dasco, akan dikonsultasikan terlebih dulu dengan Ketua Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua PKB Muhaimin Iskandar.

"Tentunya sebagai orang timur, kita akan cari hari yang baik, tanggal yang baik untuk peresmian sekretariat tersebut," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/10).

Menurut Dasco, koalisi sudah menyiapkan pembangunan gedung Sekber. Namun, gedung Sekber yang berada di kawasan Jakarta Pusat itu disebut masih dalam tahap renovasi.

"Pada saat tahap sekarang, sudah siap untuk digunakan dua partai ini. Sehingga dalam waktu dekat apa yang diharapkan oleh Cak Imin juga menjadi harapan kami untuk segera dapat

kita resmikan dan segera berfungsi," ujarnya.

Dasco memastikan, peresmian Sekber dihadiri oleh kedua partai baik Gerindra maupun PKB.

Sebelumnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan bahwa koalisi PKB-Gerindra segera meresmikan Sekber. Peresmian Kantor Sekber di kawasan Menteng, Jakarta Pusat itu dimaksudkan sebagai langkah awal pemenuhan menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024).

Meskipun, kedua partai belum mendeklarasikan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

"Kita akan mulai dengan peresmian Sekber PKB-Gerindra dalam waktu dekat di Menteng, Jakarta Pusat," kata Muhaimin Iskandar dalam keterangannya, Senin (17/10) lalu.

Cak Imin melanjutkan, agenda koalisi berikutnya adalah deklarasi capres dan cawapres.

Menurut dia, deklarasi itu akan dilakukan setelah komunikasi koalisi PKB-Gerindra dengan partai lain berakhir. ● han

2 Polhukam

FOTO: ANT



Nyatakan Siap Nyapres, Ganjar Dipanggil DPP PDI-P, Pengamat: Belum Tentu Bersalah

Ganjar Pranowo dipanggil ke Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, untuk diminta klarifikasi soal pernyataannya siap menjadi calon presiden untuk 2024.

JAKARTA (IM) - Pengamat politik yang juga Founder Cyrus Network, Hasan Nasbi, mengatakan Ganjar Pranowo belum tentu bersalah dengan menyatakan kesediaannya menjadi seorang calon presiden (capres).

Ganjar yang merupakan Gubernur Jawa Tengah, diketahui dipanggil ke Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, untuk diminta klarifikasi soal pernyataannya siap menjadi calon presiden untuk 2024.

"Untuk proses klarifikasi itu, belum tentu Ganjar ber-

salah. Belum tentu juga akan dapat peringatan dari partai," ujar Hasan, Senin (24/10).

Hasan menjelaskan, proses klarifikasi yang dilakukan oleh sebuah partai politik kepada kadernya boleh-boleh saja dan tidak perlu diributkan. Pasalnya, hal tersebut menjadi salah satu bentuk penertiban organisasi oleh partai.

Kemudian, Hasan mengatakan jika ada seorang kader yang sudah tidak sejalan dengan partainya, maka lebih baik mengundurkan diri.

"Jika ada satu atau dua

orang kader tertentu dalam sebuah partai, yang merasa sudah tidak sejalan dengan garis dan tertib organisasi, sebaiknya memang dengan gentleman mengundurkan diri dari partai. Itu akan jauh lebih baik," tuturnya.

"Sebab, sebagai organisasi, parpol harus hidup jauh lebih panjang dari usia figur mana pun. Jadi harusnya organisasi tidak mau diacak-acak oleh siapapun," kata Hasan.

Hasan pun menyatakan dirinya mendukung usaha partai politik dalam menggerakkan disiplin organisasi, termasuk meminta keterangan dan klarifikasi. Apalagi, kata Hasan, demokrasi di Indonesia ditopang oleh partai politik. "Dan demokrasi hanya berjalan baik kalau partai politik punya marwah, punya harga diri, disiplin

dan tertib," jelasnya.

Apabila sebuah partai membiarkan kadernya yang punya aspirasi yang berbeda dengan partai, tapi menyatakannya secara terbuka kepada publik, maka demokrasi akan kacau balau.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan, partainya akan memanggil Ganjar Pranowo atas pernyataannya yang siap maju jika ditugaskan sebagai capres. Pemanggilan itu untuk meminta Ganjar melakukan

klarifikasi atas pernyataannya itu. "Ya, kita tunggu saja momentumnya, Pak Ganjar pun akan kami lakukan klarifikasi terkait pernyataannya," kata Hasto ditemui di GBK Arena, Jakarta, Minggu (23/10) lalu.

Bukan tanpa alasan, pemanggilan itu karena PDI-P hingga kini masih fokus membantu masyarakat. Menurut Hasto, PDI-P belum memprioritaskan soal pencapresan untuk Pemilu 2024. Soal pencapresan akan diumumkan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati. ● han

Dewas KPK Persilakan Firlu Bahuri Cek Kesehatan Lukas Enembe di Papua

JAKARTA (IM) - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) persilakan Ketua KPK, Firlu Bahuri, menemui Gubernur Papua, Lukas Enembe (LE) di Jayapura. Hal tersebut diperbolehkan asalkan pertemuan itu dalam rangka tugas penegakan hukum KPK.

Pernyataan tersebut disampaikan anggota Dewas KPK, Albertina Ho, untuk menanggapi adanya rencana Firlu Bahuri menemui Lukas Enembe, tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek di Papua.

"Kalau dalam rangka pelaksanaan tugas tidak dilarang," kata Albertina Ho saat dikonfirmasi awak media, Senin (24/10).

Firlu tidak perlu mengantongi izin dari Dewas jika kepentingannya bertemu Lukas dalam rangka proses penegakan hukum. Hal itu dipastikan Albertina setelah mendapat informasi soal rencana Firlu ke Papua untuk melihat kondisi kesehatan Lukas.

"Kalau tidak dilarang kan tidak perlu izin, yang penting dalam rangka pelaksanaan tugas," ucap Albertina.

Sebagaimana diketahui, kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening menyebut Firlu Bahuri akan ikut bersama tim dokter independen ke Jayapura, Papua. Roy Rening mengklaim Firlu akan ke Papua dalam rangka untuk melihat langsung kondisi kesehatan Lukas.

"Jadi, pemeriksaan kesehatan ini oleh tim independen ini akan dilakukan di Jayapura, dan pimpinan KPK sendiri, menurut Pak Asep (Asep Guntur Rahayu/Direktur Penyidikan KPK), Ketua KPK akan hadir langsung bersama tim dokter independen yang akan berangkat ke Jayapura," kata Roy Rening, Senin (17/10).

Sebagaimana diketahui, tim kuasa hukum serta dokter pribadi Lukas Enembe sempat bertemu penyidik KPK yang dipimpin oleh Direktur Penyidikan (Diridk) Brigjen Asep Guntur Rahayu, Senin

17 Oktober 2022. Pertemuan itu, dalam rangka membahas kondisi kesehatan Lukas Enembe.

Tim kesehatan dari IDI rencananya berangkat ke Jayapura untuk memastikan kondisi kesehatan Lukas Enembe dalam waktu dekat. Dokter KPK, IDI, dan dokter pribadi Lukas Enembe bakal membahas lebih detail teknis pemeriksaan Lukas di Jayapura.

Lukas sempat menjalani tes kesehatan oleh tim dokter pribadi dari Singapura. Hasilnya, Lukas disebut mengalami kelemahan pada ekstremitas atau gangguan gerak dan bicara. Oleh karenanya, Lukas berencana dilakukan MRI di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura.

Lukas Enembe diduga terjerat sejumlah dugaan kasus korupsi. Di antaranya, terkait penerimaan suap dan gratifikasi proyek di daerah Papua. Lukas ditetapkan sebagai tersangka bersama sejumlah pihak lainnya. Sayangnya, KPK belum membeberkan secara detail siapa saja yang jadi tersangka serta konstruksi perkara yang menjerat Lukas Enembe.

Lukas telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Migrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atas permintaan KPK. Ia dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung mulai 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023.

Tak hanya itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga sudah memblokir rekening milik Lukas Enembe dan pihak-pihak yang terkait. Pemblokiran dilakukan karena PPATK menemukan ada transaksi keuangan yang janggal atau mencurigakan.

Informasi terbaru, ada temuan PPATK terkait transaksi keuangan Lukas yang mengalir ke rumah judi alias kasino di luar negeri. PPATK menyebut jumlahnya hampir setengah triliun. KPK sedang mendalami temuan PPATK tersebut. ● me

Politikus Golkar Pimpin Deklarasi Relawan Go-Anies di Jakarta

JAKARTA (IM) - Kelompok relawan pendukung Anies Baswedan, yang menamakan dirinya sebagai Go-Anies mendeklarasikan dukungan bagi mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk maju sebagai Capres 2024, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Sejumlah kader dari Partai Golkar tampak hadir dalam acara deklarasi dan pengukuhan tersebut, di antaranya politikus Partai Golkar Sirajuddin Abdul Wahab.

Kendati begitu, Sirajuddin menegaskan bahwa gerakan relawan Go-Anies bukan merupakan representasi dari sikap partainya. Ia menyatakan, gerakan itu murni dari dirinya sendiri.

"Gerakan ini enggak. Saya memang kader Golkar. Ini menjadi hak konstitusional saya untuk memilih siapapun nanti untuk menjadi presiden di 2024," terang Koordinator Nasional Go-Anies itu.

Sirajuddin menjelaskan dukungan itu didasari atas kinerja Anies selama memimpin DKI Jakarta. Baginya, kinerja Anies nyata membawa perubahan baik yang signifikan dalam ibu kota.

"Yang dilakukan Mas Anies adalah karya nyata, kerja nyata, dan merubah warga Jakarta, tidak hanya untuk warga Jakarta, tetapi untuk Jakarta yang menjadi ibu kota yang mendunia," ujar Sirajuddin.

Selain kader Partai Golkar, acara itu turut dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti Eks Sekjen AMPI Yamin Tawary, Ketua DPD NasDem Depok Hardiono, hingga mantan Ketua IDI M Daeng Faqih.

Surya Paloh

Sementara itu, secara terpisah Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkapkan alasannya mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024. Surya menilai Anies merupakan sosok yang tepat untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan.

Hal itu diutarakan saat menyampaikan pidato dalam kegiatan silaturahmi kebangsaan dengan sejumlah doktor dan guru besar dari berbagai universitas, di Ballroom NasDem Tower, Jakarta, beberapa waktu lalu.

"Sekarang, saya dukung Anies (karena) pada waktu ini, (dia) yang saya anggap tepat untuk memperkuat nilai-nilai

kebangsaan," ujar Surya, Senin (24/10).

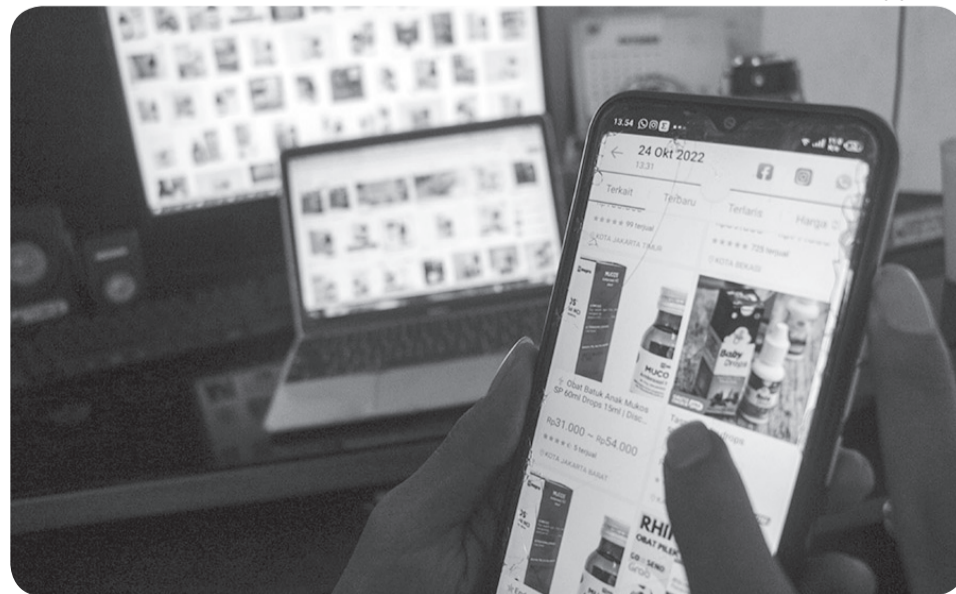
Dia heran dengan beberapa pihak yang menilai Partai NasDem sebagai "kadrun", yakni julukan untuk orang-orang yang dianggap berpikiran sempit, terpengaruh gerakan ekstremisme, dan fundamentalisme dari Timur Tengah, bahkan radikal setelah mengusung Anies sebagai capres pada Pemilu 2024.

Hal yang hampir serupa, ujarnya terjadi pada Pilkada 2017. Pada saat itu, ia menyampaikan bahwa NasDem mendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Namun, akibat dukungan itu Partai NasDem dicap berbagai pihak sebagai partai penista agama.

"Kan aneh, dukung Ahok saya dibalang penista agama, sekarang dukung Anies dibalang ini baru jadi kadrun," ujar Surya.

Ucapan Surya Paloh itu langsung disambut gelak tawa dari para pihak yang menghadiri silaturahmi kebangsaan tersebut. Sebelumnya, DPP Partai NasDem secara resmi telah mendeklarasikan dan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024. ● han

FOTO: ANTARA



PANTAU PENJUALAN OBAT DARING YANG MENDUNGUNG EG DAN DEG Warga menggunakan perangkat elektronik untuk berbelanja obat secara daring di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (24/10). Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan, ada 4.922 pranala (link) toko online (daring) yang menjual sirop obat tidak aman, dan BPOM menggendang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta asosiasi e-commerce untuk melakukan penghapusan link situs penjual produk obat sirop yang dinyatakan tidak aman karena mengandung cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) melebihi ambang batas aman.

mandiri

PEMBERITAHAAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE)
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

Kepada Yth.
Toko Beras Sumber Alam/ Sdr. Suantono (Pemilik)
Di tempat

Menunjuk Perjanjian Pengalihan Piutang Bank (Cessie) telah dilakukan dengan Akta Notaris Prima Hedy, S.H., Mkn. No.156 tanggal 21 Oktober 2022 dan Perjanjian Kredit Jangka Pendek No.PK/29/10/IKMK tanggal 24 Maret 1997 PT. Bank Bumi Daya (Persero) Cabang Jakarta Bursa Efek yang saat ini menjadi PT Bank Mandiri (Persero), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Sesuai catatan administrasi kami, jumlah kewajiban kredit Saudara dengan nomor rekening 104010000236 per tanggal 21 Oktober 2022 adalah sebesar Rp. 514.148.578.00 (lima ratus empat belas juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- Sebagai upaya penyelesaian fasilitas kredit Saudara maka pada tanggal 21 Oktober 2022, kami telah melaksanakan pengalihan piutang (Cessie) atas fasilitas kredit Saudara berikut dokumen yang berhubungan dengan fasilitas kredit Saudara kepada kreditur baru sbb:
 - Nama : Handi Kurniawan
 - Alamat : Jl. Jatibaru Bunder No.4, RT.003/RW.009, Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Dengan telah beralihnya piutang tersebut maka setiap dan/atau seluruh piutang atau tagihan kredit Saudara menjadi hak dan milik dari kreditur baru tersebut.

Jakarta, 25 Oktober 2022
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Regional Retail Collection & Recovery Region V